PULAU GALANG SEBAGAI PENAMPUNGAN PENGUNGSI VIETNAM

Bunari
Pendidikan Sejarah FKIP - Universitas Riau
bunari1975@gmail.com

Abstract

Galang Island known in the past Royal Malay (Kerajaan Melayu) as the hiding place of the Lanon (Pirates) also a topic of discussion of the international community when the United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) placement of refugees "boat people" from Vietnam were stranded in several islands of the Riau archipelago Indonesia. The Vietnamese refugees came the first time on May 22, 1975 in marine waters West Bunguran Northern Natuna Island, Riau Islands which initially only 24 people in a short time reached a peak to 250,000 people. This research was conducted using the method of history that can be interpreted as a method of research and writing of history by using the method, a systematic procedure or technique in accordance with the principles and rules of the science of history. Then, be expected with this study obtain information on Indonesian nation in the International arena of caring helping refugees who vacillate in the sea to be rescued.

Keyword: *Refugee Camps*

PENDAHULUAN

Bicara soal kepedulian dan toleransi tentunya bangsa Indonesia sudah tidak diragukan lagi dimana kita sering membantu negara lain yang sedang dilanda musibah dan berbagaai konflik. Disaat banyak negara-negara laain yang kurang simpatik dan peduli, bangsa Indonesia justru dengan tangan terbuka menerimanya meskipun sebenarnya bangsa Indonesia itu sendiri dalam keadaan perekonomian yang tidak terlalu baik. Hal ini dapat kita lihat ketika banyaknya "manusia perahu" pengungsi Vietnam yang eksodus dari negaranya akibat perang saudara terombang-ambing di Laut Cina Selatan diterima dan ditempatkan di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

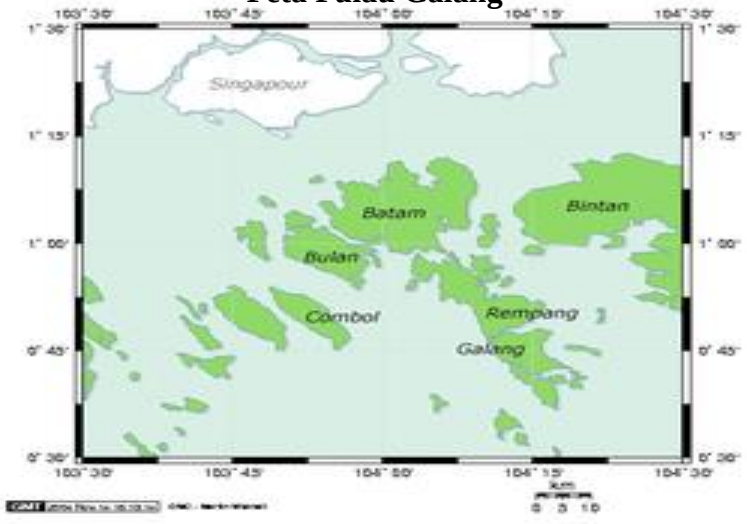
Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sekitar, Galang memiliki arti yang bermakna landasan. Pulau tersebut dikenal sebagai sebuah pulau yang memiliki potensi kayu Seraya. Kayu Seraya diyakini sebagai bahan dasar untuk membuat perahu atau kapal yang memiliki kualitas baik. Dari pulau inilah kemudian terlahir sebuah "lancang" (bahtera raja) yang diyakini masyarakat setempat sebagai kapal milik Sultan Malaka dan dari kisah terciptanya kapal tersebut lahirlah toponimi Galang.

Setelah penaklukan Belanda terhadap Kerajaan Melayu Riau pada tahun 1784 menimbulkan rasa tidak puas dan rasa dendam yang mendalam pada beberapa pemimpin Kerajaan Melayu Riau. Walaupun perlawanan secara terang-terangan tidak dapat dilakukan lagi, secara diam-diam telah diorganisir suatu gerakan yang dikenal dengan gerakan Lanun (gerilya di laut). Gerakan ini bertujuan merebut kembali kedaulatan Kerajaan Melayu Riau. Gerakan-gerakan Lanun cukup membuat resah pemerintah Belanda dan Inggris. Gerakan Lanun melakukan aksinya dengan merampok setiap kapal asing yang memasuki perairan Riau. Akan tetapi, kapal-kapal anak negeri tidak diganggu sama sekali. Pusat-pusat kegiatan Lanun ini tersebar di seluruh perairan Riau. Kapal-kapal Lanun tidak memiliki tanda pengenal tertentu. Penyerangan Lanun selalu dilakukan secara tiba-tiba di tempat-tempat yang strategis **(Ahmad Yusuf, 1993)**.

Setelah Indonesia merdeka ternyata Pulau Galang masuk ke wilayah geografis Tanjungpinang, baru pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya Kepres No. 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya (Barelang) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 Km atau 115 % dari luas Singapura **(Batam Industrial Development Authority, 2014).**

Membicarakan Pulau Galang dalam wilayah administratif, secara kronologis harus di mulai dengan membicarakan Pulau Batam terlebih dahulu. Karena secara administratif, Pulau Galang menjadi bagian dari Batam. Sejak dua puluh tahun silam, pulau kecil Batam yang terletak di sebelah utara Kepulauan Riau telah berkembang dengan sangat pesat di luar imajinasi orang. Sampai tahun 1970-an bahkan sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Kebangkitan perkembangan ekonomi pulau tersebut dimulai sejak penggunaannya sebagai basis logistik dan penunjang eksplorasi sumber daya minyak dan gas oleh Pertamina, pada akhir tahun 1960-an.

Peta. 1
Peta Pulau Galang



Sumber : id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Batam.png
Koordinat **:** 0° 45′ 0″ N, 104° 14′ 0″ E

Pulau Galang yang terletak di daerah Otorita Batam, Kepulauan Riau ini ternyata bukan hanya terkenal pada saat Kerajaan Melayu Riau-Lingga maupun saat Batam mulai dikembangkan yang diharapkan menjadi Singapuranya Indonesia. Pada masa lalu Galang juga menjadi perhatian dibandingkan daerah lain di wilayah Indonesia, khususnya ketika pengungsi asal Vietnam masih menempati area penampungan yang disediakan Pemerintah Indonesia, sekitar kurun waktu 1976-1996. Di Pulau Galang ini dibangun kamp-kamp pengungsi asal Vietnam yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kamp tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan peri kemanusiaan sejak tahun 1976, untuk menampung pengungsi asal Vietnam yang terancam jiwanya jika mereka tetap tinggal di negaranya **(Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1989)**

Pulau Galang memiliki luas wilayahnya 80 km^2 sekitar 35 km sebelah tenggara Pulau Batam. Pulau Galang semula hanya pulau kosong yang tidak berpenghuni, kemudian dimanfaatkan sebagai perkebunan nenas dengan mendatangkan tenaga kerja dari daerah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat Flores tersebut kemudian menetap dan menjadi masyarakat lokal hingga saat ini. Perkebunan nenas tersebut dikelola sebuah perusahaan nasional bernama PT. Mantrust, namun pada tahun 1972 PT. Manstrust menutup usaha perkebunannya di Pulau Galang karena situasi dan kondisi perekonomian saat itu yang tidak memungkinkan untuk usaha terus dilanjutkan.

Nama Pulau Galang mulai menjadi pembicaraan masyarakat internasional ketika *United Nation High Commisioner For Refugees* (UNHCR) datang ke Pulau Galang melakukan *Survey* untuk penempatan pengungsi asal Vietnam dan Kamboja yang mulai berdatangan diperairan Indonesia, khususnya Kepulauan Riau. *Survey* itu dilakukan karena tempat pengungsi Vietnam yang datang pertama kali datang tanggal 22 Mei 1975 di perairan laut Bunguran Barat bagian Utara Pulau Natuna, Kepulauan Riau di pandang sudah tidak memadai lagi. Waktu itu jumlah pengungsi yang semula hanya 24 orang dalam waktu singkat bertambah menjadi 40.000 orang dan mencapai puncaknya menjadi 250.000 orang. **(Kompas, 21 Juni 2001)**

Pemilihan Pulau Galang sebagai tempat memproses para pengungsi Vietnam tersebut karena wilayah Pulau Galang merupakan tempat yang strategis dan memenuhi persyaratan yang sangat cocok sebagai tempat pemrosesan para pengungsi ketika akan dikirim kegara ketiga. Jika di lihat secara letak geografis, Pulau Galang bertetangga dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga dapat memudahkan jalur komunikasi dan kerja sama antar negara tersebut selama masa memproses para pengungsi Vietnam. Selanjutnya mudah untuk menyalurkan pengungsi ke negara ketiga, wilayahnya cukup luas untuk pendirian kamp pengungsi, penduduknya sedikit serta tempat tersebut mudah dicapai demi keperluan bantuan logistik baik itu dari pemerintah pusat maupun dari negara tetangga **(Ismayawati, 2013: 16).**

Sebelum dijadikan tempat pemrosesan pengungsi Vietnam, pulau galang dikenal dengan berbagai hal, yakni :

1. Pulau Galang dikenal sebagai Pulau para Lanun, seperti Peristiwa tahun 1784 dan 28 Juni 1837. (Ahmad Yusuf, dkk, 1993). Hal ini bermula dari sejarah penaklukan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Kerajaan Melayu Riau pada tahun 1784 menimbulkan *rasa tidak puas dan rasa* dendam yang mendalam pada beberapa pemimpin Kerajaan Melayu Riau.

   Pada tanggal 28 Juni 1837 terjadi pertempuran yang sengit di Pulau Galang. Pertempuran tersebut pecah ketika sepasukan lanun membajak sebuah kapal perang Inggris yang bernama Andromache yang dipimpin oleh Kapten H.D. Chods. Dalam pertempuran tersebut, pihak Inggris dengan bersusah payah akhirnya dapat menghancurkan armada lanun. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi seluruh kapal lanun yang berhasil ditawan, ditemukan beberapa dokumen berisi instruksi-instruksi dengan tanda penyerangan yang diatur dan ditandatangani oleh seorang pangeran bernama Haji Abdurrachman putra almarhum Raja Idris saudara almarhum Raja Jaafar.
2. Pulau Galang bagian dari Kekuasaan Kerajaan Riau Lingga dan Belanda, sesuai perjanjian 1 Desember 1857.
3. Pulau Galang sebagai tempat penanaman Karet, mulai tahun 1938-1941. (Kunarto,1980:21-23)
4. Pulau Galang sebagai tempat penampungan tentara Jepang Tahun 1945, sebelum dikembalikan kenegaranya. (Kunarto, 1980:21-23)
5. Pulau Galang sebagai Perkebunan nanas oleh PT. Mansurt sekitar tahun 1971(Ismayawati, 2013: 16).

Akhirnya UNHCR bersama Pemerintah Daerah Riau, khususnya Pemerintah Daerah Kepulauan Riau ketika itu, menyetujui pemindahan para pengungsi yang berada dibeberapa wilayah kesatu tempat di Pulau Galang ini tahun 1979. Maka, segera dibangun barak-barak penampungan di Pulau Galang dengan diberi nama tertentu untuk memudahkan dalam pendataan para pengungsi nantinya.

Hasil wawancara dengan **Penjaga Museum Pulau Galang, Hadi** sedikitnya ada 48 situs peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu keadaan pengungsi Vietnam dan banyak diantaranya tersimpan dalam museum ini. Seperti perkakas memasak, kerajinan hasil karya tangan pengungsi, peralatan yang digunakan PMI/ UNHCR, kartu tanda pengenal untuk pengungsi Pulau Galang, data penghuni barak, sepeda pengungsi, motor patroli petugas pengamanan, kliping koran masa lalu dan lain sebagainya.

Akan tetapi sekarang, perkampungan para pengungsi Vietnam itu telah menjadi wilayah terbuka untuk dikunjungi masyarakat karena telah ditinggalkan para pengungsinya. Dengan dukungan mengesankan dari komunitas internasional, UNHCR yang berurusan

dengan masalah-masalah pengungsi dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Angkatan Laut (AL) pada waktu itu, para pengungsi Vietnam yang dilindungi di Pulau Galang telah berhasil dipulangkan. UNHCR dan pemerintah Indonesia menyatakan bahwa areal permukiman Vietnam itu menjadi wilayah konservasi "museum terbuka" untuk umum yang dilindungi keberadaannya sebagai bukti kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang penting dalam sejarah peradaban modern di Asia Tenggara.

Terkait dengan penanganan bekas kamp pengungsi Vietnam, hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam terjalin cukup baik. Diantaranya diwujudkan dalam deklarasi antara Indonesia dan Vietnam tentang kerangka hubungan persahabatan dan kemitraan komprehensif memasuki abad 21 (*Declaration on the Framework of friendly and comprehensive partnershi[p entering the 21 st century).* Deklarasi yang ditandatangani oleh kepala negara masing-masing negara tersebut di Hanoi 25 Juni 2003 pada intinya mendorong peningkatan berbagai dialog dalam penanganan isu bilateral, regional dan isu-isu internasional lainnya serta peningkatan pertemuan tinggi antara kedua negara dan mencakup berbagai bidang. Vietnam merupakan mitra strategis bagi Indonesia baik dalam kerangka kerja sama ASEAN (dominasi kewibawaan Indonesia), maupun secara geopolitik dan militer dalam membendung potensi ancaman dari utara. Oleh karena itu, hubungan Indonesia-Vietnam yang sudah terjalin cukup baik tersebut harus dapat dipelihara dengan baik tanpa harus merugikan kepentingan negara.

Demikian juga terhadap rencana pengembangan Pulau Galang yang merupakan bekas penampungan pengungsi Vietnam. Salah satu rencana program untuk pengembangan Pulau Galang adalah dengan mendirikan museum. Tujuan pendirian museum untuk memaparkan fakta sejarah serta sebagai sarana edukasi dan bukan politik dengan memperhatikan prinsip-prinsip kenetralan, objektivitas, edukatif, informatif dan inklusif. Hal ini juga didukung oleh kondisi Pulau Galang saat ini, di mana dilokasi tersebut beserta benda-benda peninggalannya sangat potensial jika dilestarikan dan dimanfaatkan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode sejarah yang dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematik sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Sebagaimana dikatakan Louis Gottschalk memaknai metodelogi sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Louis Gottschalk yang dikutif oleh Helius Sjamsuddin, 2007 menyimpulkan bahwa prosedur penelitian dan penulisan sejarah bertumpu pada empat kegiatan pokok, yaitu:

1. Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan.
2. Menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik.

3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya dari bahan-bahan yang otentik.
4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau suatu penyajian yang berarti.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menggunakan metode *historis* untuk mengungkapkan sebuah penulisan Pulau Galang sebagai penampungan pengungsi vietnam yang dapat mengungkapkan peran sejarah Pulau Galang itu sendiri dan peran serta pemerintah Indonesia dikancah dunia internasional dari peristiwa yang terkait dengan Pulau Galang. Sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk membuat bentuk pengembangan Pulau Galang. Penulisan tentang Pulau Galang ini tidak memiliki indikasi politik (*political will*) apapun.

PEMBAHASAN

Pulau Galang yang dulunya dikenal sebagai tempat persembunyian para Lanon (Bajak Laut), ternyata status tersebut masih tidak cukup. Nama Galang justru lebih dikenal lagi tentang cerita "manusia perahu" yang mendunia. Karena peristiwa kemanusiaan yang terjadi di sana, pulau ini menjadi terkenal seantero jagad, khusunya bagi mereka yang harus merelakan diri untuk lari dari tanah luhur mereka. Sekalipun pemberitaan tentang Pulau Galang didominasi oleh eksodus manusia perahu dari Vietnam yang lari dari kekejaman penguasa komunis Polpot dengan Khmer merahnya. Tanpa penguraian tentang asal muasal eksodus manusia perahu ke Pulau Galang, maka sejarah pulau ini akan terasa terputus dari benang merahnya.

Pertanyaan muncul adalah mengapa terjadi eksodus oleh manusia perahu ke Pulau Galang? Siapa manusia perahu tersebut? Apa itu Indochina? Mengapa peperangan di Indochina terjadi? Bagaimana situasi dunia saat terjadinya peperangan Vietnam? Siapa yang andil dalam hal ini? Itulah beberapa pertanyaan, di antara puluhan pertanyaan lainnya. Namun dalam pemaparan penulisan ini lebih tertumpu tentang sejarah Pulau Galang sebagai penempatan pengungsi akibat konflik di Vietnam dan negara sekitarnya yang melahirkan gelombang eksodus ke diberbagai wilayah di Indonesia terutama kepulauan Riau.

Jatuhnya Saigon, ibu kota Vietnam Selatan pada 30 April 1975 yang kemudian diganti nama dengan Hio Chi Minh City itu menjadi pertanda jatuhnya Vietnam Utara ketangan Vietnam Selatan sekaligus menjadi pertanda berakhirnya perang saudara masyarakat Vietnam. Meskipun di Vietnam Selatan, Vietnam Utara yang berpaham komunis tidak mendapat respon yang baik. **(Winarko, 2007).**

Sebelum jatuhnya Kota Saigon pada tahun 1975 yang mengawali gelombang pertama eksodus manusia perahu ke berbagai negara, perang Vietnam yang juga sering disebut sebagai *Perang Indochina Kedua*, atau *konflik militer*, *the Vietnam Conflict* atau *perang Amerika*, merupakan satu konflik militer hasil *perang dingin* yang terjadi di Vietnam, Laos dan Cambodia dari 26 September 1959 – 30 April 1975. Perang ini merupakan perang Indochina gelombang II dan melibatkan pasukan komunis Vietnam Utara, yang secara rahasia didukung oleh sekutu-sekutunya,

melawan Pemerintah Vietnam Selatan dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat dan negara-negara anti komunis lainnya. Perang Vietnam ini merupakan konflik militer yang berlangsung dari 1959 sampai 1975, dan disulut oleh Gerilya Komunis (Vietcong) di Selatan, yang mendapat dukungan dari Vietnam Utara yang komunis, yang berupaya untuk menjatuhkan pemerintah Vietnam Selatan. Pada dasarnya perang Vietnam merupakan perebutan kekuasaan antara komunisme dengan demokrasi-Amerika Serikat melawan Vietnam Utara **(TEMPO, 28 Agustus 1982).**

Dalam rentang tahun 1945 dan 1954, Vietnam melakukan peperangan anti kolonialisme melawan penjajah Perancis. Didukung oleh Amerika yang memberi dana militer dan ekonomi sebesar 2.6 juta dolar AS, dimana pasukan Vietnam berhasil memukul mundur pasukan Perancis yang akhirnya menyerah kalah di Dien Bien Phu. Kekalahan pasukan Perancis kemudian diikuti dengan Konferensi Perdamaian di Jenewa, di mana waktu itu negara-negara di dalam Indochina (Vietnam, Cambodia dan Laos) mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Namun, Vietnam waktu itu untuk sementara terpecah menjadi dua, yakni Vietnam Selatan yang nasionalis demokratis dan anti komunis dan Vietnam Utara yang menganut sistem komunisme. Sebenarnya pernah ada upaya untuk melakukan penyatuan (reunifikasi) ke dua negara ini pada tahun 1965, namun dengan dukungan AS, Vietnam Selatan menolak untuk ikut dalam pemilu reunifikasi (referendum). Permulaan pertempuran antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan terjadi pada tahun 1958, dengan Viet Cong mulai melakukan serangan ke pemerintah Vietnam Selatan dengan taktik gerilya (**Sardiman, AM. 1983)**

Presiden Vietnam Selatan yang pro AS, Ngo Dinh Diem jatuh dan terbunuh dalam upaya kudeta pada tahun 1963 oleh para jendralnya sendiri. Kudeta ini menyebabkan terjadinya kepanikan politik di Vietnam Selatan. Situasi keamanan di Vietnam Selatan terus memburuk dan ini menyebabkan pejuang komunis begitu cepat meraih kemenangannya. Pada tahun 1965, Presiden AS Lyndon Johnson menyutujui pengeboman berkala terus menerus di Vietnam Utara untuk menghindarkan kejatuhan rezim Saigon secara total. Ia juga memerintahkan operasi rahasia mengawali masuknya pasukan AS di daerah Da Nang.

Kejatuhan Saigon sebetulnya menjadi titik permulaan eksodus besar-besaran maupun yang rahasia keluar dari Vietnam. Menurut catatan dari pemerintah Hanoi terdapat lebih dari 200.000 orang Vietnam Selatan yang terdiri dari pejabat pemerintah, militer serta tentara dikirim ke *reeducation camps.* Di kamp re-edukasi ini para mantan pejabat pemerintah tersebut harus memulai *pendidikan ulang* tentang kenegaraan, politik, loyalitas, dan sebagainya. Para mantan pengungsi di Pulau Galang yang kemudian tinggal di negara ketiga mengumukakan situasi kritis penuh penderitaan di kamp yang dipakai untuk propaganda komunisme ini.

Untuk Indonesia khususnya, para pengungsi Vietnam ini mulai memasuki pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Indonesia di kepulauan Riau seperti pulau Laut, Pulau Kukuh, Kepulauan Anambas dan pulau-pulau kecil lainnya sebelum akhirnya dipusatkan di Pulau Galang pada tahun 1979 **(Poesponegoro, 2008).**

Kedatangan pengungsi pertama kali ke Indonesia adalah di Pulau Laut, Kepulauan Natuna pada 25 Mei 1975 dengan 75 orang pengungsi. Ketibaan pengungsi di Vietnam ini tidak semuanya dalam keadaan sehat tapi ada juga pengugsi yang meninggal ketika dalam perjalanan. Hal tersebut karena kekurangan makanan akibat lamanya berada di laut, serangan bajak laut, sakit, dan rasa frustasi dalam ketakutan merupakan beberapa hal lain yang biasanya harus mereka lalui selama proses pelarian (Wawancara dengan Nurendi, 25 Agustus 2015). Berikut tabel serangan bajak laut atas perahu Pengungsi Vietnam:

Tabel II
Serangan Bajak Laut Atas Perahu Pengungsi Vietnam

Rincian Tentang Pengungsi	**Tahun 1981**	**Tahun 1982**	**Tahun 1983**
Jumlah Kedatangan	15.095 Orang	5.913Orang	3.171 Orang
Meninggal dunia akibat serangan	571 Orang	155 Orang	43 Orang
Korban akibat diculik	243 Orang	157 Orang	89 Orang
Korban akibat diperkosa	599 Orang	179 Orang	85 Orang
Korban Hilang	Tidak diketahui	443 Orang	153 Orang
Kapal yang diserang	352 (77%)	141 (65%)	77 (56%)

Sumber: UNHCR (November 1983) dalam Histma, 2012: 5
*Data ini tidak termasuk korban meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit

Politik bebas dan aktif adalah sikap politik luar negeri Indonesia, yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Bebas artinya bahwa negara Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif dalam pengertian peran Indonesia dalam percaturan dunia Internasional tidak bersifat reaktif, dan Indonesia tidak menjadi objek percaturan dunia internasional. Indonesia berperan serta atas dasar cita-cita bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Karena heterogenitas kepentingan bangsa-bangsa di dunia, maka politik luar negeri Indonesia harus bersifat fleksibel dalam arti moderat dalam hal yang kurang prinsipial dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti yang ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945. Politik luar negeri juga harus lincah dalam menghadapi dinamika perubahan hubungan antar bangsa yang cepat dan tidak menentu. Daya penyesuaian yang tinggi diperlukan dalam menghadapi dan menanggapi perkembangan-perkembangan tersebut. **(Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007).**

Mengapa terjadi konflik di Vietnam sehingga berdampak terhadap eksodus besar-besaran para pengungsi dalam hal ini pemerintah Indonesia sangat menyadari, bahwa kawasan Asia Tenggara adalah kawasan strategis yang menjadi incaran negara-negara besar khususnya persaingan perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang senantiasa berusaha menanamkan pengaruhnya *(sphere of*

influence) kekawasan ini **(Wirengjurit, 2002).**

Para pengungsi yang sempat tinggal di Pulau Galang ternyata tidak semuanya dapat dikirim ke negara ketiga, untuk menghirup hidup bebas sebagaimana teman-teman mereka terdahulu. Ternyata banyak sekali yang tersisa dan tidak bisa dikirimkan kenegara yang mahu menerimanya. Sebagai resiko yang dialaminya adalah mereka harus rela dipulangkan kembali ke negaranya Vietnam setelah dilakukan perjanjian perdamaian.

Selama pemerosesan administratif yang sepenuhnya ditangani di bawah UNHCR, segala aktivitas klarifikasi status pengungsi, verifikasi latar belakang presekusi (penekanan politik) dilakukan oleh petugas-petugas UNHCR yang didatangkan dari berbagai negara, terutama negara-negara penerima pengungsi tersebut yang tergabung dalam satu organisasi yang dinamakan *Joint Voluntary Agencies* (JVA). Sedangkan perwakilan-perwakilan negara penerima yang melakukan verifikasi disebut sebagai Delegasi (Canada, Australia, dan sebagainya). Sementara itu Amerika Serikat memiliki Delegasi mereka sendiri, yakni United States Delegation.

Solusi yang ditawarkan oleh UNCHR untuk penangan pengungsi vietnam, tertera dalam pasal 1 Statuta UNCHR, yaitu:

1. Pemulangan Sukarela *(Repratriation)*
   Syarat yang diperlukan untuk pemulangan pengungsi secara sukarela ke negara asalanya adalah keamanan dan pulihnya perlindungan nasional. Jika keduanya belum ada, seringkali pemulangan pengungsi hanya bersifat sementara.
2. Penempatan di negara ketiga *(Resettlement)*
   Pemindahan pengungsi ke negara ketiga ini merupakan alat perlindungan terhadap pengungsi yang hidup, kebebasan, keamanan, kesehatan, hak fundamental lainnya menghadapi resiko di negara suaka. *Resettlement* merupakan bentuk berbagi beban dan tanggung jawab antara para peserta Konvensi 1951.
3. Integrasi Lokal
   Dalam integrasi lokal, negara suaka menawarkan agar pengungsi dapat tinggal secara permanen di wilayahnya. Sehingga ada kemungkinan naturalisasi kewarganegaraan pengungsi (Harahap, 2014: 7)

Akhirnya solusi pemulangan sukarela dan penempatan di negara ketiga menjadi opsi yang digunakan untuk pengungsi vietnam. Sesuai dengan hasil pada pertemuan tanggal 21 Februari 1979 yang menghasilkan *Bangkok Statement* (Poesponegoro, 2008). Dimana isi dari pertemuan di Bangkok itu meminta setiap negara-negara kawasan Asia Tenggara membantu meringankan beban pengungsi dengan menyiapkan suatu tempat untuk penampungan sementara. Tempat penampungan sementara itu digunakan sebagai tempat tinggal sementara para pengungsi sebelum akhirnya akan dipulangkan kembali ke negara asal ataupun dikirim ke negara ketiga.

Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand setuju dengan hasil dari pertemuan tersebut namun negara-negara tersebut hanya menyediakan tempat untuk para pengungsi tinggal. Untuk biaya pemeliharaan para pengungsi itu tanggung jawab UNHCR badan PBB yang bergerak menangani maslah pengungsi. Setelah mendapatkan status sebagai pengungsi, maka para pengungsi memiliki hak untuk di lindungi secara hukum.

Selain menunggu hasil pemerosesan, para pengungsi ini juga melakukan aktivitas-aktivitas lain sebagaimana kehidupan normal. UNHCR pun berpendapat bahwa para pengungsi ini harus dipersiapkan untuk hidup secara layak di negara ketiga. Dengan demikian mereka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan secara khusus sehingga mereka bisa cepat untuk beradaptasi dengann kehidupan baru. Di bawah UNHCR, beberapa badan dunia di bidang pendidikan membentuk sebuah konsorsium untuk menangani masalah penyiapan *resettlement* para pengungsi.

1. Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mempersiapkan para pengungsi dewasa supaya bisa beradaptasi dalam dunia kerja di negara ketiga, Consortium SCF dan EIL membuka kelas-kelas bahasa dan kursus-kursus keterampilan, misalnya: *Language School dan Vocational School*

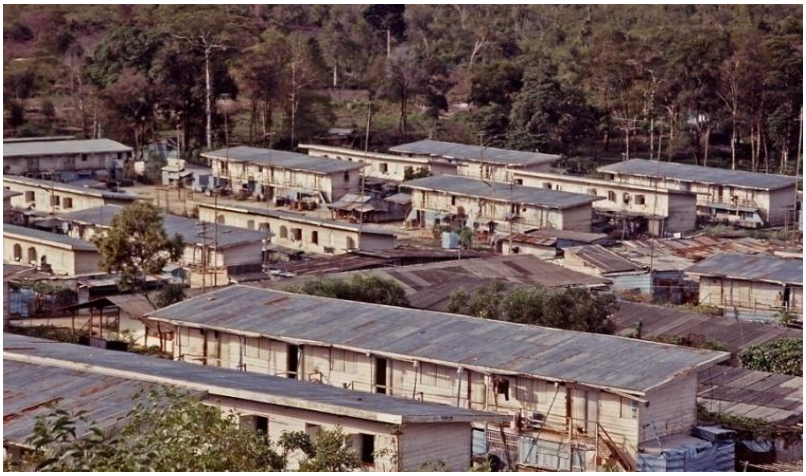
2. Kesehatan

Untuk menentukan apakah seorang pengungsi (yang sudah *screened in*) layak secara kesehatan untuk pergi ke negara tujuan, PMI bekerja sama dengan delegasi negara tujuan yang bertugas di bidang kesehatan. Dengan demikian keputusan ini tidak hanya berdasar pada tes kesehatan PMI saja, namun ada penentu lain, yang amat penting. Dalam hal ini, terdapat banyak kasus di mana seorang yang sudah mendapat status pengungsi keberangkatannya tertunda-tunda disebabkan ia belum bisa lulus dari tes kesehatan. Kadang, sesorang harus melakukan tes kesehatan ini berkali-kali. Kasus penyakit yang paling umum yang menghambat keberangkatan seorang pengungsi seringkali dengan penyakit nafas.

Harapan untuk pergi ke negara ketiga, keputusasaan atas hasil *screening* yang negatif, kesedihan, kekalutan akan situasi yang tidak menentu di Pulau Galang, serta ketakutan dan kekhawatiran menghadapi konsekuensi ketika harus menginjakkan kaki mereka di Vietnam lagi, bercampur aduk. Sementara itu, banyak negara-negara, termasuk Indonesia mulai memikirkan tentang upaya mengakhiri operasi penampungan pengungsi.

Namun, sejalan dengan derasnya pengungsi yang masuk mencapai puncaknya pada era awal 1980-an keadaan penanganan Kamp semakin memerlukan penanganan yang terkoordiatif. Di negara-negara penampung pengungsi Vietnam keadaan kritispun semakin mendorong

mereka melakukan upaya-upaya darurat. Dengan menipisnya sumber daya dari masing-masing negara penampung sementara, yang juga mengalami masalah dalam negeri sendiri-sendiri, keadaan di kamp pengungsi, termasuk di Pulau Galang semakin membebani pemerintah. Keadaan darurat di Pulau Galang juga membuat kerepotan di negara ini. Eksodus besar-besaran terus berlanjut, sementara itu tempat penampungan juga semakin penuh disesaki dengan para pengungsi.



Barak Pengungsi Vietnam di Pulau Galang yang sampai saat ini sebagian masih tetap utuh berdiri

Pemerintah Indonesia mulai bergerak untuk mengosongkan Pulau Galang sesuai yang telah ditetapkan pada kesepakatan Negara-negara ASEAN dan UNHCR bahwa pengelolaan pengungsi Vietnam tersebut hanya sementara. Menangani permasalahan tersebut dibentuklah Kogas (Komando Tugas) yang bertugas untuk mempercepat pemulangan kembali masyarakat pengungsi Vietnam di Pulau Galang, sesuai hasil Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan (Rakor Polkam) pada 7 Mei 1996 di Jakarta **(Djamhari, 2007).** Jumlah manusia perahu yang tersisa 4.570 orang yang pada umumnya rata-rata berasal dari kelompok aliran keras (mantan militer, politisi dan pelaku kriminal) yang cenderung menolak untuk dipulangkan ke negara asalnya. Apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan sampai batas yang telah ditentukan maka UNHCR akan menghentikan bantuannya dan pengungsi Vietnam tersebut menjadi tanggung jawab dari negara asal yang kemungkinan akan menjadi beban nasional dan akan menimbulkan dampak negatif. Untuk itulah Kogas dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tugas Kogas pun berakhir setelah Pulau Galang kosong pada 19 September 1996. Setelah pemulangan para pengungsi dan Pulau Galang kosong, diadakan serah terima asset UNHCR yang ada dipulau Galang kepada Mayjen TNI Arie J. Kumaat

Ternyata Pulau Galang menjadi catatan tersendiri bagi mantan pengungsi Vietnam yang pernah tinggal di daerah tersebut dan kini sudah sukses di negara ketiga. pada tanggal 24 Maret 2005 mereka mengadakan reuni di Pulau Galang dengan dihadiri 142 orang, merupakan yang terbesar bagi para pengungsi

Vietnam, setelah terakhir meninggalkan Pulau Galang tahun 1996 lalu. Pertemuan ini dikoordinir oleh sebuah perusahaan swasta Singapura dan didukung penuh oleh Otorita Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Mereka melakukan ziarah dan melihat seluruh fasilitas pengungsi yang masih tersisa. Di tempat ini, mereka juga membangun monumen sebagai simbol ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Seperti pada UNHCR, Palang Merah Internasional (PMI), Pemerintah Indonesia dan negara lain yang pernah membantu sewaktu mereka dalam pelarian. Pihak Otorita Batam memberikan respon positif atas kunjungan dari 'Manusia Perahu' ini. Diharapkan reuni ini membuat potensi daerah di kepulauan Riau, khususnya Barelang (Batam-Rempang-Galang), dapat semakin dikenal di manca negara.

Dari hasil wawan cara dengan beberapa pekerja yang sedang beristirahat di sekitar gereja menuturkan, ada kalanya eks pengungsi meneteskan air mata. Dikatakan, mereka (eks pengungsi) menangis karena perasaan yang bercampur-aduk menyesaki dada. Ada yang menyesal karena sudah tak ingat lagi di tempat (barak) mana mereka pernah tinggal, tapi ada pula yang merasa terharu karena sebagian kamp tetap terpelihara. Bagi para pengungsi yang pernah menjejakkan kaki di sana, Pulau Galang sangat berarti segala-galanya.

Saat ini di Pulau Galang yang tersisa adalah prasasti, kamp-kamp, makam para pengusi yang meninggal dan berbagai fasilitas yang dulu pernah digunakan para pengungsi. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Pulau Galang sebagai "Musium Terbuka" tentang nilai-nilai kemanusian yang bisa dikunjungi masyarakat umum. Dimana cara ini diharapkan mampu menunjukkan pada masyarakat dunia tentang peran Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusian yang harus dikedepankan.

KESIMPULAN

Pulau Galang pada awalnya merupakan pulau kecil yang kosong tidak berpenghuni karena itu pada masa kekuasaan Kerajaan Melayu dijadikan sebagai persembunyian bajak laut (Lanon) setelah melakukan perampokan kapal-kapal milik Belanda mapun Inggris. Akan tetapi nama Galang lebih terkenal lagi setelah dijadikan sebagai sebagai penempatan pengungsi manusia perahu asal Vietnam oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia. Dipilihnya Pulau Galang karena letaknya yang lebih dekat dengan Singapura yang dinilai aksesnya lebih mudah bila dilakukan pengiriman ke negara ketiga.

Dengan adanya penempatan pengungsi asal Vietnam di Pulau Galang ini menunjukkan pada masyarakat internasional akan kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusian. Para manusia perahu yang terdampar diberbagai wilayah Indonesia diselamatkan dan ditempatkan di pulau ini. Hal ini juga yang kemudian menjadikan Pulau Galang dijadikan sebagai "Musium Terbuka" tentang nilai-nilai kemanusian untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Saat ini di Pulau Galang yang tersisa adalah prasasti, kamp-kamp, makam dan berbagai sarana lainnya yang

masih tersisa yang dulunya digunakan oleh pengungsi. Di pulau ini juga sekarang sudah dibuka sebagai tempat rekreasi bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Hal ini dilakukan agar pengunjung bisa melihat bagaimana masa lalu di pulau ini terdapat pengungsi yang merupakan korban perang saudara di negeri asalnya dan mengambil nilai-nilai positifnya bagaimana nilai kemanusian harus dikedepankan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yusuf Dkk, 1993, *Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau ke Kesultanan Melayu Lingga-Riau*, Pemprov Riau.

Arung Sejarah Bahari IV Provinsi Kepulauan Riau;Menguak Jalur utama pelayaran dan Perdagangan di Pusat Peradaban Melayu. Direktorat Geografi Sejarah, Jakarta

Batam Industrial Development Authority (BIDA). *Galang, Memory of a Past Tragedy*. BIDA, Batam.

Ensiklopedi Nasional Indonesia. PT. Cipta Adi Pustaka. Jakarta.1989.

Ismayawati,I, 2013, *Manusia Perahu.* PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

Jurnal Sejarah Histma. 2012. *Manusia Perahu dalam Lembaran Sejarah Indonesia (Ravando).* BKMS UGM, Yogyakarta

Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan; Untuk Perguruan Tinggi.* Paradigma, Yogyakarta

Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Inti Idayu Press, Jakarta

(Online), http://www.academia.edu. /3774645/PERANAN_UNHCR_DALAM_MELINDUNGI_PENGUNGSI_DI_INDONESIA (diakses 7 September 2014)

Poesponegoro, MD dan Notosusanto, N. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. PT Balai Pustaka, Jakarta.

Sardiman, AM. 1983. *Kemenangan komunis Vietnam dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Politik di Asia Tenggara.* Liberty, Yogyakarta

Wirengjurit, D. 2002. *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir*. PT. Alumni, Bandung